



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR : 03 / 800.2.4.1 / 12 / P.III-B.III / 34 / 2026

Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan ketentuan-ketentuannya, menyatakan bahwa



n a m a	:	Karina Rahmawardani, S.H
tempat / tanggal lahir	:	Gresik, 20 Oktober 1994
NIP	:	199410202019032010
pangkat / gol.ruang	:	Penata Muda Tk.I (III/b)
j a b a t a n	:	Auditor Ahli Pertama
i n s t a n s i	:	Pemerintah Kabupaten Gresik

TELAH MENGIKUTI

pada Pelatihan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dari tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2026 secara tatap muka di Yogyakarta, yang meliputi 50 jam pembelajaran.



Jakarta, 12 Juni 2026

a.n. Menteri Dalam Negeri

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Dokumen Ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sugeng Hariyono



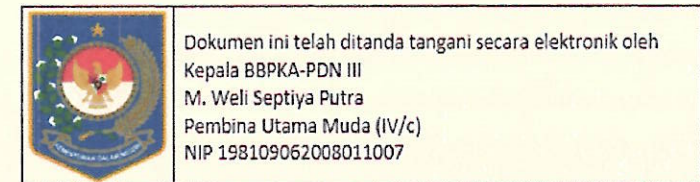
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah

DAFTAR MATA PELATIHAN

NO	MATA PELATIHAN	JAM PELAJARAN
1.	<i>Building Learning Commitment</i>	2
2.	<i>Best Practice</i> : Implementasi SAKIP (Filosofi dan Langkah Konkrit)	2
3.	Implementasi SAKIP (Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SAKIP yang Berdampak)	3
4.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - LKJIP Perangkat Daerah)	3
5.	Pelaporan Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja - Perjanjian Kinerja Gubernur dan Perangkat Daerah)	2
6.	Ceramah Peran Strategis SAKIP dalam Mendukung Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	2
7.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh APIP	8
8.	Strategi Peningkatan Implementasi SAKIP	5
9.	Penguatan Evaluasi AKIP Internal	5
10.	<i>Desk Pohon Kinerja</i>	10
11.	Pendalaman Evaluasi Pelaporan Kinerja	5
12.	Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah	3

Yogyakarta, 12 Juni 2026

Kepala BBPKA – PDN III



Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik yang Diterbitkan Oleh BSrE Sehingga tidak Diperlukan Tandatangani dengan Stempel Basah.